

Determinasi Kinerja Keuangan Daerah: Peran Government Size, Intergovernmental Revenue, dan Capital Expenditure

Putri Natasya Fauziah, Amin Wijoyo

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: putri.125239215@stu.untar.ac.id, aminw@fe.untar.ac.id

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya evaluasi kinerja keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah, di mana pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah government size, intergovernmental revenue, dan capital expenditure berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan audited Tahun 2019-2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Statistik Keuangan Pemda Tahun 2019-2023 yang dipublikasikan dalam website Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu menggunakan keseluruhan populasi. Data yang diolah dengan menggunakan Eviews 12. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa government size memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan intergovernmental revenue dan capital expenditure tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian hingga kabupaten, kota maupun desa, selain itu mengeksplorasi variabel independent lain termasuk yang dapat memediasi variabel independen terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Government Size, Intergovernmental Revenue Capital Expenditure

Abstract

The background of this research is based on the importance of evaluating regional financial performance in the context of regional autonomy, where local governments are required to optimize financial management to increase Regional Original Revenue (PAD). The objective of this study is to examine and analyze the effect of government size, intergovernmental revenue, and capital expenditure on regional financial performance. The data used in this research are secondary data derived from audited financial reports for the period 2019–2023 issued by the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Regional Financial Statistics for 2019–2023 published by the Central Bureau of Statistics (BPS). This study employs a saturated sampling technique, using the entire population. Data were processed using EViews 12. The results reveal that government size has a positive and significant effect on regional financial performance, whereas intergovernmental revenue and capital expenditure do not have a significant effect. Future research is recommended to expand the research objects to include regencies, cities, and villages, and to explore other independent variables, including potential mediating variables, that may influence regional financial performance.

Keywords: Regional Financial Performance Government Size, Intergovernmental Revenue Capital Expenditure

Pendahuluan

Pada zaman orde baru, Indonesia menyelenggarakan sistem pemerintahan secara sentralisasi yaitu pemusatan seluruh kebijakan dan kewenangan pada tingkat tertinggi dalam struktur organisasi (Nuradhawati, 2019). Setelah berakhirnya orde baru dan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, setelah itu mengalami perubahan dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2008 yang perubahannya membahas lebih terperinci terkait teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah, selanjutnya digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan disempurnakan oleh UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemda. Penyempurnaan tersebut lebih menekankan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dan konsep otonomi daerah (Simandjuntak, 2015). Otonomi daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi (Erviantono et al., 2025; Wulandari, Qolby, Devi, & Azis, 2025).

Sistem desentralisasi merupakan sistem yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara luas kepada pemda (pemda) untuk menjalankan pemerintah yang efektif, mengelola sumber daya, mendistribusikan segala kebutuhan masyarakat dengan merata, membuat kebijakan daerah yang lebih demokratis dan tidak terpusat, hingga berfokus untuk menyejahterakan masyarakat guna mencapai tujuan bardirinya Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 (Abdullah, 2016; Edi & Tjenreng, 2025; Haq, Musyafa, & Rosidin, 2025; Yusdianto, 2015). Pemda diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 (Arsya Laila Dewi, 2025; Syah, 2021). Kebebasan yang diberikan kepada pemda dalam bentuk hak untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang paling tepat kepada masyarakatnya agar tercipta masyarakat yang kreatif dan inovatif tanpa adanya intervensi yang berlebih dari pemerintah pusat (Dalisawintri, Noor, & Irawan, 2025; Silitonga, Utama, & Yuliani, 2022).

Pemberian hak dan wewenang kepada pemda untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya sekaligus melaksanakan roda pemerintah dapat dikatakan tepat sasaran sebagai daerah yang maju dan berkembang apabila pemda mampu menciptakan penyelenggaraan yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, salah satunya melalui penerbitan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) (Dalisawintri et al., 2025; Edi & Tjenreng, 2025). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dituangkan dalam laporan keuangan daerah dengan menganut prinsip tepat waktu pelaporan yang mengikuti standar yang berlaku. LKPD terdiri dari satu tahun pelaporan berbasis akrual yang terbagi menjadi laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran (Simandjuntak, 2015). LKPD terdiri dari tujuh laporan yang menjelaskan mengenai posisi terkait transaksi keuangan yang dilakukan pemda. LKPD terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasioanal (LO), Laporan Arus Kas (LAK), laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan bahwa LKPD yang disusun akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mulai dari masyarakat, lembaga pengawas, setiap wakil rakyat, lembaga pemeriksa, dan pihak-pihak yang berperan dalam memberi donasi, pinjaman, investasi hingga pemerintah pusat. maka dari itu informasi yang tercakup dalam LKPD harus spesifik dan dapat digunakan sesuai dengan

kebutuhan pemakai (Mulia, 2019). Terdapat dua alasan utama penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagai berikut.

1. Jika dilihat dari sisi internal, laporan keuangan salah satu alat pengendalian dan evaluasi bagi pemda secara menyeluruh baik keseluruhan maupun unit-unit didalamnya.

2. Jika dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pengguna laporan keuangan yang disampaikan oleh penanggungjawab daerah (kepala daerah). (Mahmudi, 2010 dalam Sahertian, 2016).

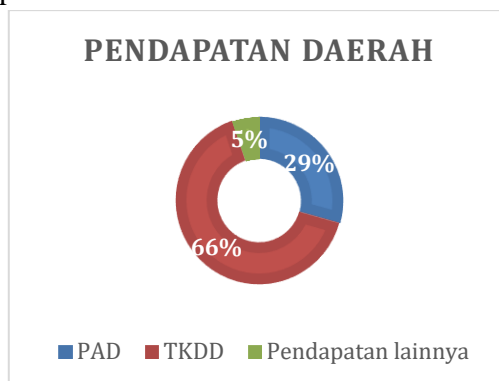
Jika dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi (Andini Kartika Dewi et al., 2025; Kamandita & Suwandi, 2025). Evaluasi tersebut secara berkala dapat dilakukan sebagai pengukuran kinerja keuangan. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemda yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 25 Tahun 2021 menerangkan bahwa pengukuran kinerja merupakan indikator penilaian kesesuaian sasaran, tujuan, dan capaian atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemda. Pengukuran kinerja yang dilakukan merupakan output atas penilaian yang sistematis dan berdasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak (Nasution, 2018).

Penilaian Kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu utama yaitu penerimaan, belanja, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kondisi makro ekonomi dari daerah tersebut (Insani, Rahayu, dan Erwati., 2023). Untuk melihat keberhasilan suatu pemda dalam mempertanggungjawabkan hak otonominya maka harus diukur menggunakan instrumen yang objektif. menurut Halim, 2008 dalam Sari & Mustanda, 2019 menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dapat dilihat dengan membandingkan periode terkini dengan periode sebelumnya dengan tujuan untuk menentukan kecenderungan yang terjadi pada saat pengelolaan yang dilakukan pemda.

Tidak hanya di Indonesia, salah satu contoh negara yang juga melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan pada pemda di negaranya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengelolaan keuangan tersebut dapat ditemukan di Yunani (Safitri, 2025; Syarif, 2025). Beberapa faktor tersebut adalah *Gross Domestic Product (GDP)*, populasi penduduk, *real estate*, *capital*, dan *tourist*. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda berdasarkan kesembilan rasio keuangan yang terdiri dari rasio *Return on Equity (ROE)*, *profit margin*, *Return on Assets (ROA)*, *current ratio*, *assets turnover*, *debt/equity*, *long term liabilities/totalassets*, *operating revenues/total revenues*, dan *operating revenues/operatingexpense* dipengaruhi oleh kesembilan rasio keuangan tersebut sedangkan rasio profitabilitas yang ditunjukkan dalam rasio ROA, ROE dan *profit margin* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemda terhadap kesembilan rasio keuangan tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa profitabilitas sektor pemerintah berbeda dengan sektor swasta. (Ratna Ayu, 2015).

Perbedaan sektor pemerintah dan sektor swasta ialah pemerintah tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan laba melainkan menggali potensi pendanaan daerahnya sendiri, Jika dilihat dari komposisi pendapatan daerah pada postur APBD, pendanaan dibagi tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan realisasi APBD nasional Tahun 2024 yang diperoleh dari dari

data DJPK Kementerian Keuangan per data yang diterima SIKD per 26 September 2024, sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar 66% atau 501.772 miliar rupiah dari total pendapatan keseluruhan daerah sebesar 765.813,61 miliar rupiah.



Gambar 1. Pendapatan Daerah pada APBD Nasional

Sumber: Diolah dari data DJPK Kementerian Keuangan (SIKD per 26 September 2024)

Intergovernmental revenue (Dana Perimbangan) yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan stimulus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, berdasarkan informasi dari ringkasan APBD TA 2017, pemda harus mengalokasikan 25% Dana Transfer Umum (DTU). DTU merupakan salah satu komposisi dana perimbangan yang diperuntukkan sebagai belanja infrastruktur. Belanja infrastuktur merupakan komponen dari belanja modal. Menurut (Syafira Frijunita dkk., 2021), Peningkatan belanja modal tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan PAD. penyerapan belanja modal yang tidak merata di setiap provinsi yang ada di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor seperti perencanaan yang kurang tepat, pengelolaan yang tidak efektif hingga adanya kendala administratif, penyerapan belanja modal yang sedikit, dan tergolong rendah, jauh dari rancangan yang ditetapkan dalam APBD, sehingga menyebabkan penerimaan daerah yang tidak merata.

Fenomena ini menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur yang seharusnya bertujuan untuk mempercepat perekonomian, Namun karena minimnya penyerapan belanja modal berdampak pada minimnya penerimaan daerah tersebut. (Ilmawan dan Wahyudin, 2014 dalam Syafira Frijunita dkk., 2021). Percepatan laju perekonomian yang diharapkan oleh pemda bertujuan agar pemda mampu mengelola layanan publik, menjaga stabilitas sosial, dan menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan keamanan, dan infrastruktur dengan fokus utama untuk menyejahterakan masyarakat. Percepatan laju perekonomian sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan yang baik, salah satu metode untuk menilai peningkatan kinerja keuangan pemda selain melihat indikator kegiatan, dapat dilakukan dengan cara melihat perbandingan rasio-rasio keuangan terhadap APBD. Menurut Adhiantoko, kinerja keuangan dapat diukur berdasarkan rasio seperti Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. (Siregar dan Mariana, dalam Alkhasani & Murtanto, 2024).

Kinerja keuangan pemda dalam penelitian ini dianalisis menggunakan rasio efektivitas PAD dengan cara membandingkan antara PAD yang dihasilkan dengan PAD yang telah dianggarkan. Menurut Sari dan Mustanda (2019), tingkat keefektifan kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh perbandingan realisasi dengan target PAD yang ditetapkan pemda tersebut,

dikatakan efektif apabila realisasi PAD pada suatu tahun anggaran tercapai atau melebihi target yang telah ditetapkan. Kenaikan atau penurunan PAD suatu daerah berdasarkan kemampuan pemerintahnya dalam memanfaatkan, mengatur sumber-sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Government size atau yang dikenal dengan Ukuran Pemda merupakan salah satu variabel dalam menjelaskan suatu struktur organisasi, besar kecilnya ukuran suatu pemda dapat diukur dari aset yang dimilikinya, dengan kata lain, kemampuan pemerintah untuk menghasilkan suatu aset. Namun, dalam kenyataannya, banyak aset disuatu daerah belum mampu menghasilkan pendapatan daerah secara lebih efektif dikarenakan kurangnya pemeliharaan aset tersebut. (Wijaya & Solikhi, 2021)

Pembiayaan dari pemerintah pusat atau yang disebut *Intergovernmental revenue* merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari APBN untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pelaksanaan roda pemerintahan yang efektif guna melayani masyarakat. *Intergovernmental revenue* terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penjelasan tersebut tercantum dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2, *Capital Expenditure* atau disebut Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk pengadaan atau pembelian aset tetap dan aset berwujud lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari satu periode. Menurut Andirfa dkk, 2016 dalam Ningsih, Syva & Rukmini, 2023, belanja modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik seperti peningkatan infrastruktur daerah dan termasuk belanja yang rutin dilakukan seperti pemeliharaan.

Penelitian yang dilakukan terhadap tiga faktor di atas mulai dari *government size*, *intergovernmental revenue*, dan *capital expenditure* terhadap kinerja keuangan pemda di Indonesia telah banyak dilakukan, beberapa penelitian yang menunjukkan berpengaruh atau tidak berpengaruh diantaranya sebagai berikut.

a. *Government size* dapat digambarkan dengan total aset yang dimiliki suatu daerah, dengan memadainya total aset yang dimiliki, maka pelayanan yang diberikan akan optimal, pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alvini, Basri & Hasan, 2018), (Wijaya & Solikhi, 2021), (Widya Safitri dkk., 2023), dan (Marhawai, 2015). Berbeda dengan hasil penelitian (Sari & Mustanda, 2019) (Ratna Ayu, 2015), (Ernawati & Jaeni, 2018), dan (Aafiah Millenia, 2022) yang menyatakan *government size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah keuangan, pemda harus mampu mengelola dan memanfaatkan aset agar dapat meningkatnya PAD daerah tersebut.

b. *Intergovernmental revenue* atau yang disebut dengan dana perimbangan, memengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Semakin besar *intergovernmental revenue* yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka pendapatan asli daerah tersebut akan meningkat. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Marhawai, 2015), (Gita, 2015), dan (Alvini dkk., 2018). Berbeda dengan hasil penelitian (Wijaya & Solikhi, 2021), (Ernawati & Jaeni, 2018), dan (Aafiah Millenia, 2022) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah pusat yang berakibat dana alokasi belum dapat digunakan secara efektif.

c. *Capital expenditure* atau yang disebut dengan belanja modal akan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah dengan cara penggunaan belanja modal yang tepat sasaran. Belanja modal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sari & Mustanda, 2019), (Alvini dkk., 2018), (Ningsih dkk., 2023), dan (Ernawati & Jaeni, 2018). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Nauw, 2021), (Maharani dkk., 2024), (Widya Safitri dkk., 2023) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh atas kinerja keuangan pemerintah dikarenakan belum optimalnya penggunaan belanja modal dan belum ditujukan agar mampu meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan di pemda. Pada penulisan ini, peneliti berfokus pada faktor *government size*, *intergovernmental revenue*, dan *capital expenditure* sebagai variabel independen, kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas PAD sebagai variabel dependen untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel independen tersebut terhadap peningkatan PAD suatu pemda dalam menjalankan hak otonominya. Selain itu, pembaruan dari penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian yang digunakan. Subjek penelitian yang digunakan berasal dari data laporan keuangan 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK. Peneliti ingin melihat secara menyeluruh apakah variabel independen yang digunakan memengaruhi kinerja keuangan di seluruh provinsi, sedangkan beberapa penelitian sebelumnya hanya berfokus di satu provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau dll. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Government Size*, *Intergovernmental revenue*, dan *Capital Expenditure* terhadap Kinerja Keuangan Daerah”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *government size*, *intergovernmental revenue*, dan *capital expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana ketiga variabel tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemda sebagai regulator dan pelaksana, masyarakat setempat, dan peneliti di masa depan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan, unsur, pengetahuan, elemen dan fakta dasar terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Desain penelitian ini dipilih untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi sekaligus mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengujian pengaruh *government size*, *intergovernmental revenue*, dan *capital expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan audited tahun 2019-2023 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Statistik Keuangan Pemda yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Penelitian menggunakan teknik *saturated sampling* dimana seluruh populasi dijadikan sampel

penelitian, dengan kriteria khusus bahwa pemerintah daerah tersebut telah memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh BPK. Pemilihan seluruh populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang tersedia sudah memadai dan representatif untuk dianalisis secara komprehensif, sehingga tidak diperlukan teknik sampling lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$. Pengujian hipotesis meliputi uji koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, uji F untuk menguji pengaruh simultan, dan uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan. Pemilihan model data panel dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, atau *Random Effect Model*.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Analisis Data

Uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi berganda (*Adjusted R-squared*), uji statistik F (simultan), dan uji statistik t (uji hipotesis parameter parsial) dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen *government size* (X1), *intergovernmental revenue* (X2), dan *capital expenditure* (X3) terhadap kinerja keuangan daerah di 34 Provinsi di Indonesia pada Tahun 2019-2023. Hasil regresi untuk model penelitian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Tabel Interpretasi Model Regresi

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-14.52818	4.026263	-3.608354	0.0004
X1	0.559831	0.160722	3.483220	0.0007
X2	0.091135	0.058879	1.547843	0.1240
X3	0.021678	0.047005	0.461179	0.6454

Sumber: Output EViews 12, data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1. dapat disusun persamaan regresi data panel sebagai berikut.

$$Y = -14.52818 + 0.559831 X1 + 0.091135 X2 + 0.021678 X3$$

Persamaan regresi linear berganda di atas menunjukkan arah dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika koefisien regresi dari variabel independen menunjukkan tanda positif artinya terdapat pengaruh searah terhadap variabel dependen, sedangkan jika koefisien regresi dari variabel independen menunjukkan tanda negatif artinya terdapat pengaruh yang berlawanan arah terhadap variabel dependen. Jika dilihat dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Hasil pengujian regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar -14.52818 yang mencerminkan nilai kinerja keuangan pemerintah provinsi berdasarkan rasio efektifitas akan bernilai sebesar -14.52818 jika variabel independent bernilai 0.

Nilai koefisien variabel *government size* bernilai positif sebesar 0.559831 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam *government size* menyebabkan kinerja keuangan pemerintah provinsi meningkat sebesar 0.56 satuan dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien variabel *intergovernmental revenue* bernilai positif sebesar 0.091135 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam *intergovernmental revenue* menyebabkan kinerja keuangan pemerintah provinsi meningkat sebesar 0.09 satuan dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien variabel *capital expenditure* bernilai positif sebesar 0.021678 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam *capital expenditure* menyebabkan kinerja keuangan pemerintah provinsi meningkat sebesar 0.021678 satuan dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

2. Uji Koefisien Determinasi Berganda (*Adjusted R-Squared*)

Uji Koefisien Determinasi Berganda dilakukan untuk melihat variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model. Hasil perhitungan (R^2) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Statistik	Nilai
<i>R-squared</i>	0.461357
<i>Adjusted R-squared</i>	0.315558

Sumber: Output EViews 12, data diolah (2024)

Hasil perhitungan pada Tabel 2. menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 31,5558% menunjukkan penyesuaian nilai *R-Squared* terhadap ukuran sampel dan jumlah variabel independen. Nilai dari *adjusted R-squared* menjelaskan gambaran yang lebih realistis terhadap tingkat penjelasan model terutama dalam model regresi berganda karena tidak hanya menghitung seberapa besar variabel dependen yang dijelaskan variabel independen tetapi juga memperhitungkan apakah penambahan variabel benar-benar meningkatkan kualitas model penelitian ini.

3. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji simultan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F)

Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai
R-squared	0.461357	Mean dependent var	1.038248

Adjusted R-squared	0.315558	S.D. dependent var	0.239159
S.E. of regression	0.197859	Akaike info criterion	-
			0.212683
Sum squared resid	5.206692	Schwarz criterion	0.469815
Log likelihood	55.07802	Hannan-Quinn criter	0.064267
F-statistic	3.164351	Durbin-Watson stat	2.135236
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber: Output EViews 12, data diolah (2024)

Hasil perhitungan pada Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai Prob (*F-statistic*) sebesar 0.00001, hal ini menunjukkan bahwa nilai perhitungan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *government size* (X1), *intergovernmental revenue* (X2), dan *capital expenditure* (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Uji Statistik t (Uji Hipotesis Parameter Parsial)

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai dalam tabel distribusi t sebagai berikut.

Tabel 4. Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-14.52818	4.026263	-3.608354	0.0004
X1	0.559831	0.160722	3.48322	0.0007
X2	0.091135	0.058879	1.547843	0.124
X3	0.021678	0.047005	0.461179	0.6454

Sumber: Output EViews 12, data diolah (2024)

$t_{tabel} = 1.974185$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4. dapat dijelaskan dengan t_{tabel} sebesar 1.974185 dan diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai *government size* terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi menghasilkan nilai t_{hitung} pada variabel X1 sebesar 3.483220 yang berarti lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1.974185 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0007 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y.

Setelah dilakukan pengujian parsial dengan menggunakan uji t, diketahui nilai t_{hitung} pada variabel X2 sebesar 1.547843 yang berarti lebih kecil dari tabel sebesar 1.974185 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1240 yang lebih besar dari tingkat signifikansi (0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. *Intergovernmental revenue* yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal yang bergantung dengan kondisi daerah yang bersangkutan guna mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Setelah dilakukan pengujian parsial dengan menggunakan uji t, diketahui nilai t_{hitung} pada variabel X3 sebesar 0.461179 yang berarti lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1.974185 dengan nilai probabilitas 0.6454 yang lebih besar dari tingkat signifikansi (0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, *Capital expenditure* yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. *Capital expenditure* yang besar belum mencerminkan banyaknya infrastruktur sarana yang dibangun dan belum bisa menentukan tingkat kinerja keuangan pemerintah provinsi.

Pengaruh *Government Size* Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD

Hasil penelitian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0007 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *government size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah provinsi atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari rasio efektivitas PAD.

Hal penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal dan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alvini, Basri & Hasan (2018), yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Penelitian lain oleh Widya Safitri dkk. (2023) juga menunjukkan hasil yang serupa yaitu *government size* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

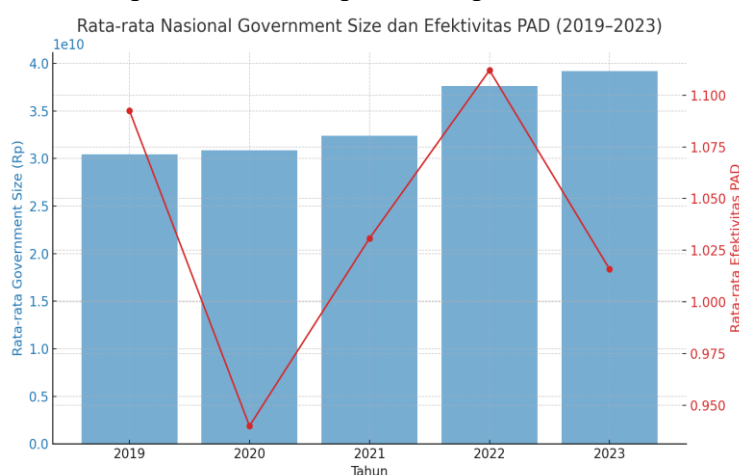
Variabel *government size* yang diproksikan dengan total aset memiliki nilai koefisien sebesar 0.559831 menunjukkan total aset secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan setiap penambahan total aset akan meningkatkan kinerja pemerintah provinsi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena pemerintah provinsi mengelola aset yang dimiliki secara efektif. Aset pemerintah yang dikelola dengan baik merupakan sarana dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pelayanan publik tetapi juga dapat menarik perhatian penduduk dan pendapatan dari kontribusi dan pajak masyarakat.

Pemerintah provinsi yang memiliki *government size* yang besar baik berupa jalan, bangunan, atau aset lainnya cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar dalam memperoleh pendapatan jika dimanfaatkan untuk menghasikan pendapatan tambahan seperti sewa bangunan atau bunga dari investasi. Selain itu, dengan memiliki jumlah aset yang besar membuka peluang untuk memperoleh PAD yang semakin tinggi, seperti pengelolaan lahan dan pembangunan proyek publik yang bertujuan untuk menarik investasi masyarakat dan asing sehingga meningkatkan kontribusi swasta terhadap PAD.

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah provinsi berperan sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya publik, termasuk aset daerah. Semakin besar aset yang dimiliki oleh daerah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk mengelolanya secara efektif dan efisien demi kepentingan publik. Besarnya aset memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih tinggi, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Apabila pemerintah mampu mengelola aset

tersebut secara optimal, maka hal ini akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah dan mengurangi potensi konflik kepentingan antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal).

Jika dilihat secara rata-rata nasional atas *government size* dan rata-rata rasio efektivitas PAD dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019--2023. *Government size* yang ditampilkan dalam bentuk batang biru mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bertambahnya kapasitas fiskal pemerintah provinsi. Sementara itu, efektivitas PAD yang divisualisasikan dengan garis merah menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022, namun sedikit menurun pada tahun 2023. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa pemda mulai mampu mengoptimalkan kinerja keuangannya secara bertahap setelah terdampak krisis pada Tahun 2020.



Gambar 2. Rata-Rata Nasional Government Size dan Rasio Efektivitas PAD

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan BPK dan Statistik Keuangan BPS (2019-2023)

Hasil Penelitian ini tidak sesuai dengan Sari & Mustanda (2019), Ratna Ayu (2015), Ernawati & Jaeni (2018), dan Aafiah Millenia (2022) yang menyatakan *government size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah keuangan, pemerintah provinsi harus mampu mengelola dan memanfaatkan aset agar dapat meningkatnya PAD daerah tersebut.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD

Hasil penelitian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.1240 yang lebih besar dari tingkat signifikansi (0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah provinsi.

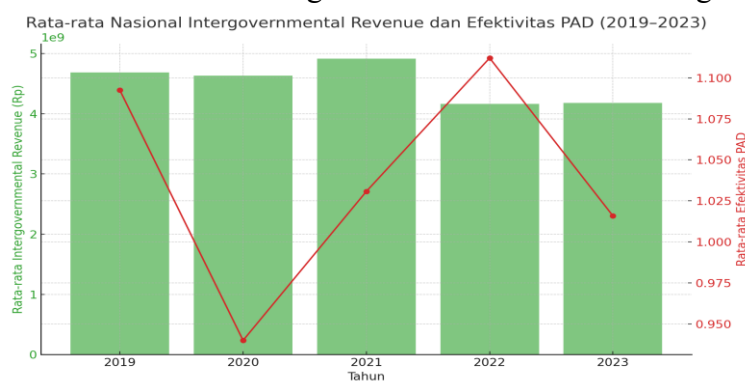
Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Aafiah Millenia (2022) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah pusat yang berakibat dana alokasi yang bertujuan menjembatani celah fiskal belum dapat digunakan secara efektif. Penelitian serupa juga disampaikan oleh Nauw (2021) yang menyatakan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Provinsi Papua Barat. Hal ini dikarenakan tingginya alokasi dana perimbangan dari

pemerintah pusat belum secara langsung mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran di daerah. Selain itu, alokasi tersebut belum dapat dijadikan tolok ukur pemerataan fiskal antardaerah, karena realisasinya belum sepenuhnya selaras dengan target dan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.

Secara statistik, variabel *intergovernmental revenue* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah provinsi. Kondisi ini diduga terjadi karena *intergovernmental revenue* tidak secara langsung terkait dengan upaya pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan PAD-nya. Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan alokasi pemerintah menyebabkan pemerintah provinsi cenderung tidak mandiri secara keuangan. Selain itu, pemerintah provinsi mengalokasikan *intergovernmental revenue* untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang tidak memberikan pelayanan publik secara maksimal, karena sering kali tujuan penggunaan bantuan pemerintah sudah ditentukan spesifik dan terbatas, sehingga tidak dapat digunakan untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu, meskipun *intergovernmental revenue* besar, dampaknya terhadap upaya peningkatan PAD yang bersifat mandiri menjadi terbatas. Pemerintah provinsi yang memperoleh dana yang signifikan dari pemerintah pusat dapat mengurangi insentif bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan PAD-nya disebabkan pemerintah provinsi kurang memprioritaskan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan PAD dikarenakan sudah ada dukungan finansial dari sumber lain.

Jika dilihat secara rata-rata nasional atas *intergovernmental revenue* dan rata-rata efektivitas PAD dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019—2023. *Intergovernmental revenue* yang ditampilkan dalam bentuk batang hijau mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan kebijakan *refocusing* anggaran dan masa transisi implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali seiring dengan implementasi penuh UU HKPD dan meningkatnya alokasi transfer ke daerah dalam APBN.

Sementara itu, rasio efektivitas PAD yang digambarkan dengan garis merah menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan fluktuasi *intergovernmental revenue*. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya dana transfer dari pemerintah pusat tidak serta-merta meningkatkan efektivitas PAD di tingkat daerah.



Gambar 3. Rata-Rata Nasional *Intergovernmental Revenue* dan Rasio Efektivitas PAD

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan BPK dan Statistik Keuangan BPS (2019-2023)

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marhawai (2015), Gita (2015), dan Alvini dkk. (2018) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh *Capital Expenditure* Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD

Hasil penelitian menunjukkan nilai probabilitas 0.6454 yang lebih besar dari tingkat signifikansi (0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *capital expenditure* tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Maharani dkk. (2024), yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja modal tersebut. Ketika belanja modal tidak diarahkan secara tepat sasaran atau dikelola dengan optimal, maka alokasi anggaran tersebut tidak akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan. Dengan kata lain, tingginya nilai belanja modal atau banyaknya proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi belum tentu mencerminkan tingginya kinerja keuangan pemerintah provinsi itu sendiri.

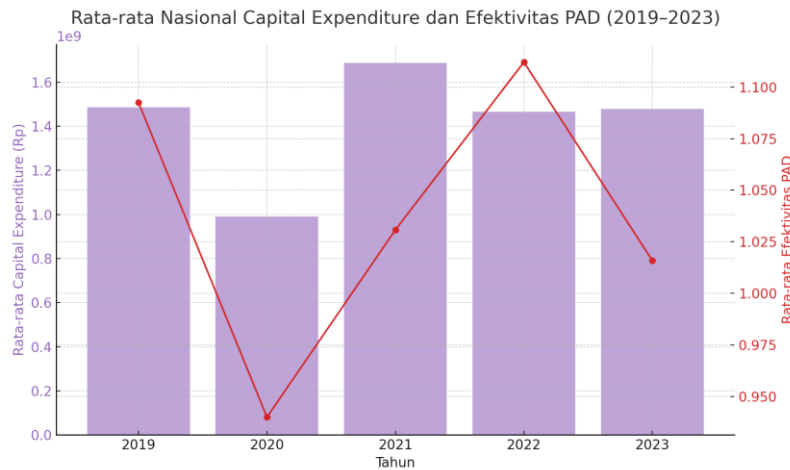
Secara statistik, variabel *capital expenditure* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah provinsi. Kondisi ini diduga terjadi karena penggunaan belanja modal tidak dikelola dan diarahkan dengan tepat. Pengelolaan yang tidak efisien dan efektif menyebabkan penggunaan belanja modal tidak akan mencerminkan peningkatan kinerja keuangan. Misalnya, pemerintah provinsi mengeluarkan belanja modal dalam bentuk aset tetap tetapi tidak memberikan kontribusi langsung dan tidak diprioritaskan untuk sektor-sektor strategis terhadap peningkatan PAD yang menyebabkan APBN yang digunakan tidak mampu memberikan PAD bagi pemerintah provinsi tersebut. Selain itu, belanja modal yang besar belum tentu mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Terkadang proyek-proyek yang dibiayai dengan belanja modal mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya koordinasi ataupun masalah pembiayaan sehingga belanja modal yang dikeluarkan tidak segera memberikan kontribusi terhadap kinerja daerah.

Dampak dari hasil negatif ini adalah bahwa pemerintah provinsi perlu mengevaluasi kebijakan belanja modalnya secara menyeluruh dengan memastikan setiap pengeluaran belanja modal diarahkan pada investasi yang memberikan nilai tambah yang jelas dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pemerintah provinsi harus meningkatkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi investasi daerah untuk memastikan setiap peningkatan belanja modal tersebut benar-benar mendukung peningkatan PAD.

Jika dilihat secara rata-rata nasional atas *capital expenditure* dan rata-rata rasio efektivitas PAD dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019—2023. *Capital expenditure* yang divisualisasikan dalam bentuk batang ungu menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2020. Penurunan ini berkaitan erat dengan kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, yang menyebabkan belanja infrastruktur dan aset jangka panjang dikurangi. Setelah tahun 2020, tren belanja modal menunjukkan pemulihan bertahap hingga 2023.

Efektivitas PAD yang ditampilkan dengan garis merah menunjukkan pola yang relatif stabil, namun tidak selalu sejalan dengan tren belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal belum tentu langsung berdampak terhadap efektivitas PAD,

tergantung pada efektivitas pengelolaan dan peruntukan belanja tersebut di masing-masing daerah.



Gambar 4. Rata-Rata Nasional *Capital Expenditure* dari Rasio Efektivitas PAD

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan BPK dan Statistik Keuangan BPS (2019-2023)

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019), Alvini dkk. (2018), Ningsih dkk. (2023), dan Ernawati & Jaeni (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh atas kinerja keuangan pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa government size berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi, yang ditunjukkan melalui rasio efektivitas PAD; hal ini mencerminkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki daerah, semakin besar pula potensi peningkatan PAD. Sementara itu, intergovernmental revenue tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, karena dana transfer dari pemerintah pusat seringkali memiliki keterbatasan penggunaan dan tidak selalu mendorong peningkatan PAD. Adapun capital expenditure menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal belum tentu berdampak langsung terhadap efektivitas PAD, terutama jika tidak dikelola secara efisien. Secara umum, ketiga variabel ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah lebih dipengaruhi oleh kapasitas internal pemerintah provinsi dalam mengelola aset dan pendapatan sendiri daripada ketergantungan pada dana transfer atau belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung. (2016). *Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah*. Jurnal Hukum Positum, 1(1), 83–103.
- Aafiah Millenia, N. (2022). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Provinsi, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 786–803. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Dalisawintri, S. E., Noor, H. Muhammad, & Irawan, Bambang. (2025). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Nas Media Pustaka.

- Dewi, Andini Kartika, Sibarani, Berliana Kristiananova, Saputra, Edi, Norazlina, Norazlina, Susanti, Sri, & Syafira, Yunda. (2025). *Strategi Efektif Pengendalian Internal dalam Keamanan Sistem Informasi Akuntansi untuk Perlindungan Data Keuangan*. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 11(1), 138–148.
- Dewi, Arsyia Laila. (2025). *Kebijakan Bottom-Up dalam Desentralisasi Indonesia: Analisis Peran Musrenbang sebagai Mekanisme Partisipasi Publik di Pemerintah Daerah*. Academia.edu.
- Edi, Abdul Ghoni Purwanto, & Tjenreng, Burhan Zubakhrum. (2025). *Dampak Kebijakan Desentralisasi Pada Pelayanan Publik Di Pemerintah Daerah Di Era Masyarakat Cerdas 5.0*. Jurnal Inovasi Global, 3(4), 654–663.
- Erviantono, Tedi, Noak, Piers Andreas, Pramana, Gede Indra, Apriani, Kadek Dwita, Erawan, I. Ketut Putra, Duarte, Efatha Filomeno Borrromeu, & Punia, I. Nengah. (2025). *Pengelolaan Kontrol Publik pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Desa Tista, Kabupaten Tabanan*. Madaniya, 6(3), 1268–1277.
- Haq, Fairuz Abdul, Musyafa, Doni Almas, & Rosidin, Utang. (2025). *Desentralisasi dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 17–32.
- Kamandita, Aurelia Zarah, & Suwandi, Suwandi. (2025). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Riset Akuntansi, 3(1), 80–106.
- Nauw, Ester Trivona. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, E-ISSN 2460-0585.
- Safitri, Nadifa Maharani. (2025). *Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara Eropa dan Oseania*. Universitas Islam Indonesia.
- Silitonga, Jose T. P., Utama, Lalu Satria, & Yuliani, Dwi Putri. (2022). *Kepemimpinan Pemerintahan dalam Penerapan Diskresi Inovasi Daerah*. Artha Media.
- Simandjuntak, Reynold. (2015). *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 7(1), 57–67.
- Syah, Wildan Habibi Muammar. (2021). *Kapasitas Badan Pemusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.
- Syarif, Kurnia Ali. (2025). *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Deepublish.
- Widya Safitri, B., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2023). *The effect of PAD, capital expenditures, government size, and budget changes on regional financial performance (in Central Java province in 2019–2021)*. IJAFIBS, 10(4), 201–208.
- Wijaya, R., & Solikhi, A. (2021). *Effect of Good Corporate Governance and Leverage on Profitability-Mediated Tax Avoidance (Study on Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2016–2019)*. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 11(2), 202–221. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS>

- Wulandari, Elisa, Qolby, Hafshoh Robi'a, Devi, Irena Sintia, & Azis, Abdul. (2025). *Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi*. Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat, 2(3), 146–160.
- Yusdianto, Yusdianto. (2015). *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW), 2(3), 483–504.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

